



# ANALISIS IPM [ INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ] KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KOTA YOGYAKARTA 2022

# TIM PENYUSUN

---



**Pengarah :**

Ig. Trihastono, S.Sos., M.M.

**Penanggungjawab :**

Joko Marwiyanto, S.Kom., M.Eng.

**Penyunting :**

Elvade Ristiono, S.I.P.

**Penulis Naskah :**

Desy Ratnaningrum, S.Si.

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan publikasi “Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2021”. Pada tahun 2020 telah disusun Publikasi dengan judul “Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2020 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pusat statistik dengan nomor : K-21.3400.001. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2021 merupakan publikasi yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian pembangunan manusia di Kota Yogyakarta khususnya sampai pada tahun 2021.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap kondisi sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk pengambilan kebijakan dalam hal pembangunan manusia khususnya di Kota Yogyakarta di masa yang akan datang. Saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penyusunan publikasi selanjutnya sangat kami harapkan. Terima Kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini.



Yogyakarta, Desember 2022

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
dan Persandian Kota Yogyakarta**

**IGNATIUS TRIHASTONO, S.Sos., M.M.**

NIP. 19690723 199603 1 005



# DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
PENDAHULUAN.....	9
A. LATAR BELAKANG.....	9
B. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	12
C. TUJUAN DAN MANFAAT.....	14
D. SUMBER DATA.....	14
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. PEMBANGUNAN MANUSIA.....	17
B. INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA.....	18
C. METODE PERHITUNGAN IPM.....	26
D. PERTUMBUHAN IPM.....	27
GAMBARAN UMUM.....	29
A. KARAKTERISTIK WILAYAH.....	29
B. KARAKTERISTIK PENDUDUK.....	31
C. PENDIDIKAN.....	33
D. KESEHATAN.....	41
E. PEREKONOMIAN.....	45
IPM KOTA YOGYAKARTA.....	50
A. PERKEMBANGAN IPM KOTA YOGYAKARTA.....	50
B. KOMPONEN KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA.....	51
C. KOMPONEN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA.....	53
D. KOMPONEN PENGELUARAN (DAYA BELI).....	56
KESIMPULAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

# DAFTAR TABEL



TABEL 2.1  
BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PERHITUNGAN KOMPONEN IPM.....26

TABEL 3.1  
LUAS WILAYAH KOTA YOGYAKARTA MENURUT KEMANTREN TAHUN 2021.....30

TABEL 3.2  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEMANTREN DAN JENIS KELAMIN DI KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2021.....32

TABEL 3.3  
PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF  
MENURUT KELOMPOK UMUR DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2021.....39

TABEL 3.4  
PERSENTASE BELANJA PENDIDIKAN TERHADAP TOTAL APBD KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017-2021.....40

TABEL 3.5  
PERSENTASE BELANJA KESEHATAN TERHADAP TOTAL APBD KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017-2021.....44

# DAFTAR GAMBAR



GAMBAR 3. 1	
JUMLAH SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2017/ 2018-2021/ 2022.....	33
GAMBAR 3. 2	
JUMLAH GURU DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2017/ 2018 – 2021/ 2022 .....	35
GAMBAR 3. 3	
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2021.....	37
GAMBAR 3. 4	
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2021.....	41
GAMBAR 3. 5	
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017- 2021.....	43
GAMBAR 3. 6	
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA YOGYAKARTA (PERSEN) TAHUN 2017 - 2021.....	47
GAMBAR 4. 1	
IPM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2021.....	51

## **Gambar 3. 4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

# DAFTAR GAMBAR



GAMBAR 4. 2 PERKEMBANGAN ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 - 2021 .....	52
GAMBAR 4. 3 PERKEMBANGAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2021 .....	54
GAMBAR 4. 4 PERKEMBANGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 - 2021 .....	55
GAMBAR 4. 5 PERKEMBANGAN PENGELUARAN PERKAPITA RIIL YANG KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 - 2021 (RIBU RUPIAH) .....	57



---

# PENDAHULUAN

---





# PENDAHULUAN



## A. LATAR BELAKANG

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan konsep pembangunan manusia (human development) sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” atau sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Salah satu upaya yang ditempuh oleh United Nation Development Programme (UNDP) adalah merilis Human Development Index (HDI) sebagai ukuran untuk menilai dan menganalisis keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia dalam suatu wilayah sejak tahun 1990 (Human Development Reports, 1990). Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan manusia. Gagasan yang dikemukakan dalam Human Development Report ini menjadi dasar dalam implementasi pembangunan

manusia. Pembangunan manusia tidak hanya dilihat atau diukur dengan besaran income yang diperoleh dan harta yang telah dimiliki manusia tersebut, akan tetapi juga meliputi dimensi lain seperti harapan hidup serta kemudahan akses dalam memperoleh kehidupan yang layak. Pencapaiannya sangat tergantung pada empat hal pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (Human Development Report UNDP, 1990).

Proses pembangunan tidak sekedar merepresentasikan aspek ekonomi dalam mengejar akselerasi pertumbuhan, namun juga menyangkut perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur atau tatanan sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan dimaknai dengan proses peningkatan kualitas hidup ke arah yang lebih baik tidak hanya dilihat dari segi perekonomian saja tetapi juga kualitas manusia itu sendiri.

Pembangunan manusia merupakan hal yang penting dan memiliki posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia harus dapat membentuk manusia yang mempunyai kemampuan kritis untuk melihat

kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural, dan sebagainya dari sistem yang ada, dan mencari alternatif-alternatif pemecahan (Tjokrowinoto, 2007). Dari sini dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia haruslah dapat memberikan nilai tambah pada manusia itu sendiri. Manusia diharapkan dapat memiliki daya untuk menghadapi segala dinamika dalam proses hidupnya.

Sementara itu, definisi pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik (Mahi dan Trigunarso, 2017). Dengan kata lain, pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan juga dilihat sebagai proses yang kompleks dimana terdapat beberapa aspek yang terkait dengan pembangunan dan dapat mempengaruhi proses pembangunan. Di samping itu, tujuan dari pembangunan adalah untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Pembangunan menitikberatkan pada kemandirian dan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari bangsa itu sendiri.

Dalam Human Development Report yang diterbitkan oleh UNDP tahun 1990, pembangunan manusia

menitikberatkan pada 3 elemen kehidupan, antara lain harapan hidup, pengetahuan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Pada elemen harapan hidup atau longevity terdiri dari aspek nutrisi yang cukup atau memadai serta kondisi kesehatan yang baik dari manusia itu sendiri. Elemen kedua adalah pengetahuan, dimana pembangunan juga dilihat dari kemudahan dalam mengakses pendidikan. Elemen ketiga adalah ketersediaan pemenuhan kebutuhan hidup layak yang meliputi berbagai macam aspek seperti akses tempat tinggal, income (pemasukan), dan sumber daya lainnya. Untuk mencapai pembangunan manusia yang komprehensif, UNDP telah merumuskan beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai proses pembangunan manusia di dalam suatu negara. Indikator tersebut kemudian dikenal dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia.

## **B. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Indeks Pembangunan Manusia mulai diperkenalkan pada tahun 1990 oleh UNDP. Sementara di Indonesia Indeks Pembangunan Manusia sejak tahun 1996 mulai diterapkan sampai level provinsi dan kabupaten/kota. Seperti yang telah dipaparkan dalam HDR (Human Development Report) 1990, terdapat beberapa indikator yang dijadikan acuan

dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Beberapa elemen yang menjadi perhatian antara lain harapan hidup yang diukur menggunakan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir. Kemudian elemen pendidikan/pengetahuan yang diukur dengan dua indikator, antara lain angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja. Ketiga, elemen standar kehidupan yang layak diukur menggunakan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) di wilayah yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, metode penghitungan IPM dan indikator penyusunnya telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Indikator-indikator tersebut mulai digunakan dalam penghitungan IPM provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menggunakan metode baru sejak tahun 2010.

Terdapat klasifikasi penilaian IPM yang telah ditentukan oleh UNDP. Klasifikasi yang dapat mencerminkan kondisi pembangunan manusia di suatu wilayah tersebut antara lain: Kelompok “sangat tinggi”:  $IPM \geq 80$ ; Kelompok “tinggi”:  $70 \leq IPM < 80$ ; Kelompok “sedang”:  $60 \leq IPM < 70$ ; serta Kelompok “rendah”:  $IPM < 60$ .

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan penyusunan publikasi ini yaitu memberikan informasi mengenai perkembangan pembangunan manusia di Kota Yogyakarta khususnya pada periode 2017–2021.

## **D. SUMBER DATA**

Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan data sekunder dari instansi pemerintah di Kota Yogyakarta dan BPS Kota Yogyakarta.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan publikasi Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **1. Pendahuluan**

- 1) Latar Belakang
- 2) Indeks Pembangunan Manusia
- 3) Tujuan
- 4) Sumber Data
- 5) Sistematika Penulisan

### **2. Tinjauan Pustaka**

- 1) Pembangunan Manusia
- 2) Indikator Pembangunan Manusia
- 3) Metode Perhitungan IPM
- 4) Pertumbuhan IPM

### **3. Gambaran Umum**

- 1) Karakteristik Wilayah
- 2) Karakteristik Penduduk
- 3) Pendidikan
- 4) Kesehatan
- 5) Perekonomian

### **4. IPM Kota Yogyakarta**

- 1) Perkembangan IPM Kota Yogyakarta

### **5. Kesimpulan**



---

# TINJAUAN PUSTAKA

---







## A. PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tidak anti pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Perhatian tidak hanya pada besar pertumbuhan tetapi juga penciptaan dan memperkuat kaitan struktur dan kualitas dari pertumbuhan, untuk menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia antara generasi sekarang dengan yang selanjutnya.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat (pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik atau nilai-nilai cul-

tural) dari sudut pandangan manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pembangunan manusia memiliki empat elemen, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Dengan peningkatan kemampuan, kreativitas dan produktivitas akan meningkat sehingga mereka akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi saat ini maupun generasi penerus.

## **B. INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu indikator kesehatan (ditunjukkan dengan indeks angka harapan hidup waktu lahir), indikator pendidikan (ditunjukkan dengan indeks angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi (ditunjukkan dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan/ indeks daya beli penduduk). Ketiga indikator ini dianggap dapat me-

ngukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Pada dasarnya IPM merupakan indeks yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama sebagai alat pembanding ini sejalan dengan fungsi indeks mutu hidup (IMH) atau Physical Quality of Life Index (PQLI) pada masa lalu. IMH disusun dari tiga komponen, yaitu: angka kematian bayi, angka harapan hidup umur satu tahun, dan angka melek huruf. Salah satu kritik mendasar terhadap IMH adalah bahwa dua komponen pertamanya kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti dibuktikan oleh kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili satu saja.

Kelemahan inilah yang antara lain melatarbelakangi dikembangkannya IPM. Perhitungan IPM mengadopsi formula yang diperkenalkan oleh UNDP sejak tahun 1990 yang sudah digunakan untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan Human Development Report. Pada tahun 2010 UNDP memperkenalkan peng-

hitungan IPM dengan metode baru, dan dilakukan penyempurnaan pada tahun 2011 dan 2014.

Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu :

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, serta Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Adapun kelebihan dari penghitungan dengan menggunakan IPM Metode Baru adalah :

- Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

- Dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM, dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian pada dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dengan menggunakan metode baru, tiga komponen penyusun IPM secara rinci dapat dilihat pada bahasan berikut:

## **1. Indeks kesehatan**

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur indeks kesehatan, namun dengan pertimbangan ketersediaan data maka UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (AHH) sebagai salah satu komponen untuk perhitungan IPM. AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun

yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah, karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk hidup lebih lama akan semakin lama dan semakin buruk kesehatan maka kematian akan semakin dekat, walaupun hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan. AHH negara berkembang lebih rendah dibandingkan AHH negara maju karena AHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang tinggi.

Untuk mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir dipergunakan metode tidak langsung. Metode ini bersumber dari dua macam data dasar yaitu rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup berdasarkan kelompok umur ibu. Prosedur perhitungan angka harapan hidup pada waktu lahir dapat dilakukan dengan menggunakan paket program Mortpak Lite atau MCPDA. Setelah mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir selanjutnya dihitung indeks kesehatan yaitu dengan membandingkan angka yang diperoleh dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini BPS dan UNDP telah menetapkan nilai minimum dan maksimumnya).

Rumus umum untuk mendapatkan indeks angka harapan hidup :

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{makz} - AHH_{min}}$$

dengan : AHH = Angka Harapan Hidup

## 2. Indeks pendidikan

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah diharapkan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Yang dimaksud dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun)

yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Indeks HLS diperoleh dengan rumus :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{makz} - HLS_{min}}$$

dengan : HLS = Harapan Lama Sekolah

Adapun angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Angka ini diperoleh dengan mengolah dua variabel sekaligus yaitu tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Perhitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Indeks RLS diperoleh dengan rumus :

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{makz} - RLS_{min}}$$

dengan : RLS = Rata-rata Lama Sekolah

Selanjutnya indeks pendidikan dapat dihitung dengan rumus :



$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

dengan : HLS = Harapan Lama Sekolah  
RLS = Rata-rata Lama Sekolah

### 3. Indeks daya beli (PPP) disesuaikan

Dengan dimasukkannya variabel PPP sebagai ukuran kemampuan daya beli, IPM secara konseptual jelas lebih 'lengkap' dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia daripada IMH atau PQLI. Oleh karena IMH yang tinggi hanya merefleksikan kondisi suatu masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang (dan sehat) serta tingkat pendidikan (dan keterampilan) yang memadai. Menurut UNDP kondisi tersebut belum memberikan gambaran yang ideal karena belum memasukkan aspek peluang kerja/berusaha yang memadai sehingga memperoleh sejumlah uang yang memiliki daya beli (purchasing power).

Untuk mengukur standar hidup secara ekonomi, dalam perhitungan IPM ini digunakan data konsumsi per kapita riil yang disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk mendapatkan

data pengeluaran daripada data pendapatan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Indeks pengeluaran diperoleh dengan rumus :

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln \ln (\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{\max} - \ln \ln (\text{pengeluaran})_{\min}}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas minimum dan maksimum sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Batas Minimum dan maksimum Perhitungan Komponen IPM**

<b>Komponen IPM</b>	<b>Satuan</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>
Angka Harapan Hidup saat lahir	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

**Sumber : BPS**

### **C. METODE PERHITUNGAN IPM**

Metode yang digunakan untuk perhitungan IPM tahun 2014 merupakan metode baru yang merupakan

penyempurnaan dari metode sebelumnya dengan rumus :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

dengan :

$I_{(Kesehatan)}$  = Indeks kesehatan

$I_{Pendidikan}$  = Indeks Pendidikan

$I_{Pengeluaran}$  = Indeks Pengeluaran

#### **D. PERTUMBUHAN IPM**

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Pertumbuhan IPM dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$



---

# GAMBARAN UMUM

---



# GAMBARAN UMUM



## A. KARAKTERISTIK WILAYAH

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa) dengan luas sekitar 32,5 km<sup>2</sup> atau 1,02 persen dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Provinsi DIY dimana sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, dan sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Terdapat 3 sungai yang mengalir melewati wilayah Kota Yogyakarta antara lain Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Kedudukan Kota Yogyakarta sejak kemerdekaan hingga masa kini menjadi Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta terbagi atas

14 kemantren (kecamatan), 45 kelurahan, mencakup 616 RW (Rukun Warga) dan 2.532 RT (Rukun Tetangga). Kemantren yang menjadi bagian dari Kota Yogyakarta yaitu Tegalrejo, Jetis, Gondokusuman, Danurejan, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan, Mantrijeron, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, Mergangsan, Umbulharjo, dan Kotagede.

**Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Kemantren Tahun 2021**

<b>Kemantren</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>% terhadap Luas Kota</b>
Tegalrejo	2,91	8,95
Jetis	1,70	5,23
Gondokusuman	3,99	12,28
Danurejan	1,10	3,38
Gedongtengen	0,96	2,95
Ngampilan	0,82	2,52
Wirobrajan	1,76	5,42
Mantrijeron	2,61	8,03
Kraton	1,40	4,31
Gondomanan	1,12	3,45
Pakualaman	0,63	1,94
Mergangsan	2,31	7,11

Kemantren	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	% terhadap Luas Kota
Umbulharjo	8,12	24,98
Kotagede	3,07	9,45
Kota Yogyakarta	32,50	100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta

Tabel 3.1 merupakan rincian dari masing-masing kemantren terkait luas wilayah, luas wilayah kemantren terhadap luas Kota Yogyakarta, jumlah kelurahan, RT, dan RW pada tahun 2020. Kemantren Umbulharjo memiliki luasan wilayah terbesar yaitu 8,12 km<sup>2</sup> atau 24,98 persen dari luas Kota Yogyakarta. Kemantren dengan luas wilayah terkecil yaitu Kemantren Pakualaman dengan luas wilayah 0,63 km<sup>2</sup> atau 1,94 persen dari luas Kota Yogyakarta.

## B. KARAKTERISTIK PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2021 tercatat sebanyak 415.509 jiwa dengan 48,75 persen penduduk laki-laki dan 51,25 persen penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kemantren Umbulharjo sebanyak 71.012 jiwa dengan persentase penduduk laki-laki sebanyak 8,36 persen dan 8,73 persen penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kota Yogyakarta pada

tahun 2021 berada di Kemantren Pakualaman yaitu sebesar 10.657 jiwa dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 1,23 persen dan 1,33 persen penduduk perempuan.

**Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2021**

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Tegalrejo	18.279	4,40	19.112	4,60	37.391
Jetis	13.245	3,19	14.041	3,38	27.286
Gondokusuman	20.835	5,01	22.344	5,38	43.179
Danurejan	10.454	2,52	10.929	2,63	21.383
Gedongtengen	9.652	2,32	10.031	2,41	19.683
Ngampilan	8.930	2,15	9.355	2,25	18.285
Wirobrajan	13.693	3,30	14.264	3,43	27.957
Mantrijeron	17.248	4,15	18.221	4,39	35.469
Kraton	10.598	2,55	11.157	2,69	21.755
Gandomanan	7.252	1,75	7.617	1,83	14.869
Pakualaman	5.124	1,23	5.533	1,33	10.657
Mergangsan	15.431	3,71	16.444	3,96	31.875
Umbulharjo	34.743	8,36	36.269	8,73	71.012
Kotagede	17.091	4,11	17.617	4,24	34.708



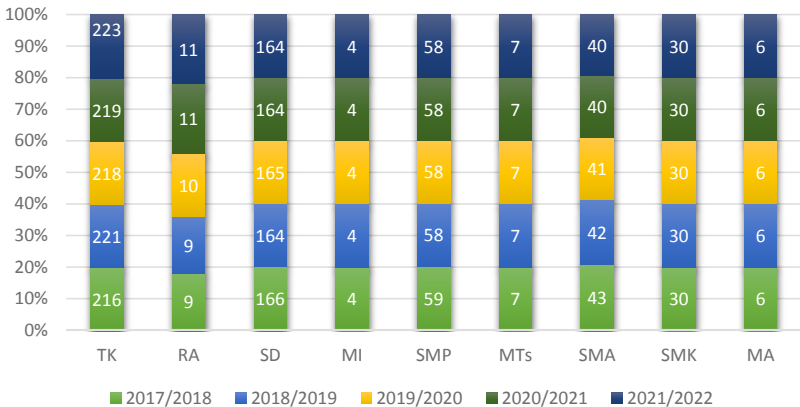
Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Kota Yogyakarta	202.575	48,75	212.934	51,25	415.509

Sumber : Data konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2021

### C. PENDIDIKAN

Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar karena menyediakan fasilitas pendidikan yang menarik minat para siswa baik dari dalam kota maupun luar Kota Yogyakarta. Jumlah sekolah di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Jumlah Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018–2021/2022



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Kementerian Agama Kota Yogyakarta (Dalam Publikasi Kota Yogyakarta Dalam Angka, Diolah)

Jumlah sekolah paling banyak di Kota Yogyakarta yaitu Taman Kanak-kanak (TK). Jumlah TK dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir cenderung bertambah. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 223 sekolah baik negeri maupun swasta. Jumlah sekolah Raudatul Athfal (RA) selama lima tahun terakhir ada penambahan unit dimana pada tahun 2017 sebanyak 9 sekolah dan pada tahun 2021 menjadi 11 unit sekolah.

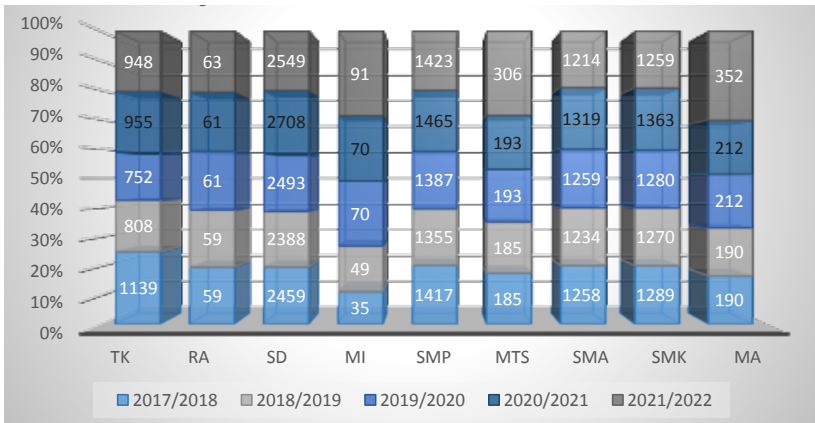
Selanjutnya jumlah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir cenderung berkurang. Tercatat pada tahun 2017 jumlah SD sebanyak 166 unit dan pada tahun 2021 menjadi 164 unit, jumlah SMP sebanyak 59 unit pada tahun 2017 menjadi 58 unit pada tahun 2021, dan jumlah SMA sebanyak 43 unit pada tahun 2017 menjadi 40 unit pada tahun 2021.

Jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir tidak ada penambahan maupun pengurangan unit dengan jum-

lah masing-masing yaitu 4 unit, 7 unit, 30 unit, dan 6 unit.

Selain fasilitas pendidikan, tenaga pendidik atau guru juga tidak kalah penting dalam pembangunan manusia dalam aspek pendidikan. Perkembangan jumlah guru di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

**Gambar 3. 2 Jumlah Guru di Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018 – 2021/2022**



**Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Kementerian Agama Kota Yogyakarta (Dalam Publikasi Kota Yogyakarta Dalam Angka, Diolah)**

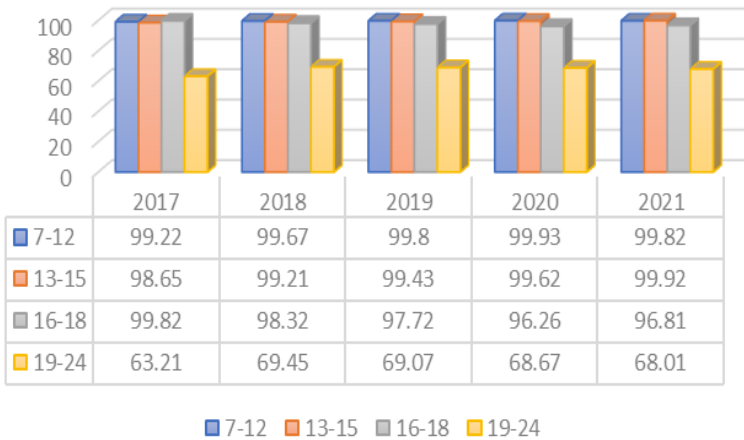
Jumlah guru selama lima tahun terakhir di setiap jenjang pendidikan cenderung fluktuatif. Jumlah guru TK pada tahun 2021 sebanyak 948 orang menurun dari tahun sebelumnya. Jumlah guru RA mengalami penambahan meskipun tidak signifikan

pada tahun 2021 terdapat 63 orang meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah guru SD tercatat paling banyak diantara guru pada jenjang pendidikan lainnya. Jumlah guru SD pada tahun 2021 sebanyak 2.549 orang lebih sedikit dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah guru MI cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 91 guru MI meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah guru SMP cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah guru SMP sebanyak 1423 guru menurun dari tahun sebelumnya. Jumlah guru MTs pada tahun 2021 terdapat sebanyak 306 guru dengan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan pada tahun sebelum-sebelumnya. Jumlah guru SMA dan SMK pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah masing-masing sebanyak 1214 guru SMA dan 1259 guru SMK. Jumlah guru MA pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian sebanyak 352 guru.

Pendidikan menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pengetahuan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kualitas hidupnya. Angka Partisipasi Sekolah merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada

suatu kelompok usia sekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta periode 2017–2021 dapat dilihat pada Gambar 3.3.

**Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2017–2021**



**Sumber: BPS Kota Yogyakarta**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir cenderung meningkat pada kelompok usia 7–12 tahun dan kelompok usia 13–15 tahun, sedangkan pada kelompok usia 16–18 tahun dan kelompok usia 19–24 tahun cenderung menurun. Pada tahun 2021 tercatat APS pada kelompok usia 7–12 tahun mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari tahun sebelumnya dengan

APS sebesar 99,82 persen. APS tahun 2021 pada kelompok usia 13-15 tahun tercatat meningkat 0,3 persen dari tahun sebelumnya dengan capaian 99,92 persen. APS tahun 2021 pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami kenaikan 0,55 persen dari tahun sebelumnya dengan capaian 96,81 persen. Sedangkan APS tahun 2021 pada kelompok usia 19-24 tahun mengalami penurunan sebesar 0,66 persen dari tahun sebelumnya dengan capaian 68,01 persen.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis.

**Tabel 3. 3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
15-44	98,73	100,00
45+	97,56	96,84

**Sumber : BPS Kota Yogyakarta, Susenas**

Angka melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf di Kota Yogyakarta pada kelompok usia 15-44 tahun mencapai 100 persen di tahun 2021 dan meningkat 1,27 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada usia 45 tahun ke atas mengalami penurunan 0,72 persen dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 96,84 persen. Tingginya angka melek huruf ini mengindikasikan kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik di Kota Yogyakarta semakin meningkat.

**Tabel 3. 4 Persentase Belanja Pendidikan terhadap Total APBD Kota Yogyakarta Tahun 2017–2021**

Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah belanja urusan pendidikan	451.057.057.376,91	381.032.183.162,54	375.686.835.468,11	336.286.388.976,00	443.382.925.238,00
Total APBD	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34	1.517.599.468.488,39	1.875.346.298.734,00
Persentase	30,38	23,05	21,66	22,16	23,64

**Sumber : BPKAD Kota Yogyakarta**

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dalam kurun waktu 2017–2021, persentase belanja urusan pendidikan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 20%. Belanja pendidikan terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu senilai 30,38% dari total APBD Kota Yogyakarta. Sedangkan di tahun 2020–2021 persentase belanja pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 belanja urusan pendidikan meningkat karena adanya insentif pendidikan PAUD, kesejahteraan insentif GTT/PTT, serta inklusi insentif GPK (Guru Pendamping Khusus). Kemudian di tahun

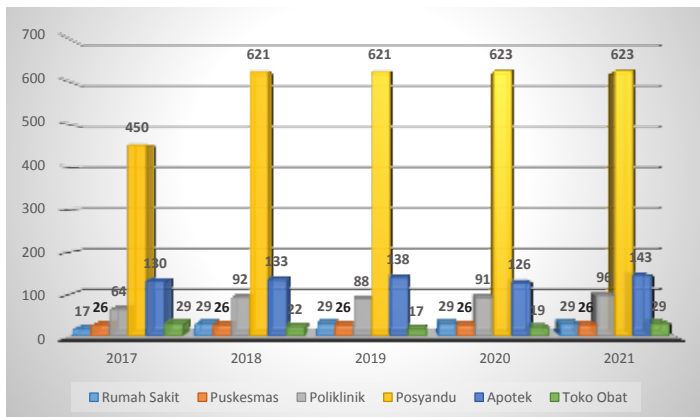


2021 ada kenaikan di satuan BOS Nasional untuk jenjang SD dan SMP serta adanya bantuan DAK fisik untuk bidang SD dan SMP.

#### D. KESEHATAN

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat antara lain menyediakan infrastruktur serta tenaga kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta saat ini sudah cukup banyak dan dapat dijangkau oleh masyarakat seperti puskesmas yang sudah tersebar di setiap kecamatan. Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.

**Gambar 3. 4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017–2021**



**Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Diolah)**

Jumlah Rumah Sakit di Kota Yogyakarta tahun 2021 sebanyak 29 unit yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Swasta, dan Rumah Sakit Khusus. Puskesmas sebanyak 26 unit yang terdiri dari 18 Puskesmas induk, dan 8 Puskesmas Pembantu. Jumlah poliklinik lima tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2021 jumlah poliklinik sebanyak 96 unit meningkat 5 unit dari tahun sebelumnya. Jumlah posyandu memiliki jumlah terbanyak dibandingkan jumlah fasilitas kesehatan lainnya, karena posyandu tersebar hingga tingkat RW. Jumlah posyandu di tahun 2021 sebanyak 623 unit. Jumlah apotek hingga 2021 cenderung meningkat dengan capaian sebanyak 143 unit pada tahun 2021 bertambah 17 unit dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah toko obat pada tahun 2017 hingga 2019 sempat menurun dan kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021 seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 29 unit toko obat meningkat 10 unit dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketersediaan tenaga kesehatan menjadi hal yang tidak kalah penting dalam menunjang fasilitas kesehatan yang sudah tersedia. Rincian jumlah tenaga kesehatan dijelaskan pada Gambar 3.5 berikut ini.

**Gambar 3. 5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017–2021**



**Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Diolah)**

Jumlah tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Jumlah tenaga kesehatan dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit di tahun 2021 yaitu perawat sebanyak 2438 orang, dokter sebanyak 1071 orang, tenaga farmasi 400 orang, bidan sebanyak 360 orang, teknisi medis sebanyak 321 orang, tenaga gizi sebanyak 90 orang, tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 55 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 33 orang.

Persentase Belanja Kesehatan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja kesehatan daerah sebanyak 10%

harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

**Tabel 3. 5 Persentase Belanja Kesehatan terhadap Total APBD Kota Yogyakarta Tahun 2017–2021**

<b>Variabel</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah belanja urusan kesehatan	293.957.094.614,42	310.949.518.124,38	323.577.594.454,29	324.743.706.389,73	485.464.256.197,00
Total APBD	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34	1.517.599.468.488,39	1.875.346.298.734,00
<b>Persentase</b>	<b>19,80</b>	<b>18,81</b>	<b>18,65</b>	<b>21,40</b>	<b>25,89</b>

**Sumber : BPKAD Kota Yogyakarta**

Dalam kurun waktu 2017–2021, persentase belanja urusan kesehatan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 10%. Belanja kesehatan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 485 miliar rupiah atau senilai 25,89% dari total APBD Kota Yogyakarta. Kenaikan persentase belanja urusan kesehatan di tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid–19 dan percepatan vaksinasi Covid–19. Anggaran untuk percepatan vaksinasi Covid–19 antara lain digunakan untuk makan minum petugas vaksinasi, penyediaan APD petugas vaksinasi, penyediaan Vitamin petugas vaksinasi, sewa sarana pendukung kegiatan vaksinasi, pem-

belian alat kesehatan pendukung kegiatan vaksinasi, pembayaran jasa/insentif bagi relawan petugas vaksinasi, dan pengelolaan limbah hasil kegiatan vaksinasi.

## E. PEREKONOMIAN

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Hal ini disebabkan karena PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output pada suatu waktu tertentu. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu sebaliknya.

**Tabel 3. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017–2021**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
Industri pengolahan	13,47	13,27	13,15	13,07	12,57

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pengadaan listrik dan gas	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15
Konstruksi	7,74	7,93	7,85	6,75	6,97
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	7,49	7,55	7,49	7,35	7,17
Transportasi dan pergudangan	3,96	3,92	4,08	3,69	3,70
Penyediaan akomodasi dan makan minum	13,55	13,55	13,78	10,92	11,03
Informasi dan komunikasi	10,45	10,42	10,26	12,52	13,42
Jasa keuangan dan asuransi	6,65	6,72	6,84	6,96	6,80
Real estat	9,1	9,09	9,15	9,74	9,36
Jasa perusahaan	1,08	1,08	1,09	0,94	0,97
Administrasi Pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	10,42	10,32	10,07	10,38	10,16
Jasa pendidikan	9,1	9,15	9,22	10,04	9,91
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,78	3,77	3,79	4,82	4,85
Jasa lainnya	2,69	2,72	2,72	2,3	2,58
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kota Yogyakarta menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi. Sektor penyediaan akomodasi dan makan

minum menjadi sektor dengan persentase distribusi PDRB terbesar selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2020, persentase distribusi terbesar berada pada sektor industri pengolahan sebesar 13,07 persen. Sedangkan pada tahun 2021, persentase terbesar yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 13,42 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 3.6.

**Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta (Persen) Tahun 2017-2021**



**Sumber: BPS Kota Yogyakarta, Diolah**

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan hingga mencapai angka -2,42 persen. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa kegiatan perekonomian tidak berjalan semestinya. Pada tahun 2021 dengan adanya kebiasaan baru dalam menghadapi pandemi Covid-19, perekonomian di Kota Yogyakarta kembali pulih dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen.





---

# IPM KOTA YOGYAKARTA

---



# IPM KOTA YOGYAKARTA



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dihitung dari Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pengetahuan yang dihitung dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang dihitung dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Angka IPM yang diperoleh suatu wilayah menggambarkan perkembangan pembangunan manusia di daerah tersebut dan menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

## A. PERKEMBANGAN IPM KOTA YOGYAKARTA

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir cenderung meningkat meskipun pada tahun 2020 sempat menurun 0,04.

**Gambar 4.1 IPM Kota Yogyakarta Tahun 2017–2021**



**Sumber: BPS Kota Yogyakarta**

Peningkatan IPM di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia di Kota Yogyakarta semakin baik. Selain itu, capaian IPM di Kota Yogyakarta menjadi tantangan berat yang harus dihadapi agar kualitas pembangunan manusia tetap terjaga dan terus meningkat.

## **B. KOMPONEN KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Salah satu komponen dalam penyusunan IPM yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir. Umur Harapan

Hidup di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 hingga 2021 terus meningkat. Capaian di tahun 2021 sebesar 74,76 artinya bahwa harapan umur seorang bayi yang lahir di Kota Yogyakarta dapat mencapai umur 74 hingga 75 tahun. Capaian ini tidak lepas dari dukungan layanan kesehatan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

**Gambar 4. 2 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Fasilitas kesehatan yang tersedia di setiap kabupaten/kota menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Aspek lain yang mendukung pembangunan sektor kesehatan yaitu program pemerintah yang memberikan kemudahan untuk mengakses layanan kesehatan bagi masyarakat. Program pemerintah yang saat ini dapat digunakan yaitu BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program pemerintah ini sangat membantu masyarakat untuk meringankan biaya pengobatan. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran tentang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

### **C. KOMPONEN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Komponen penyusun IPM kedua yaitu pendidikan yang terdiri dari aspek Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada Gambar 4.5.

**Gambar 4.3 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**



**Sumber: BPS Kota Yogyakarta**

Selama lima tahun terakhir, angka Harapan Lama Sekolah di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2021 sebesar 17,6 yang artinya bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang bersekolah selama 17,6 tahun atau setara Sarjana-1.

Aspek kedua komponen pendidikan penyusun Indeks Pembangunan Manusia yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan

oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik.

**Gambar 4. 4 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**



**Sumber: BPS Kota Yogyakarta**

Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2017 hingga 2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata Lama Sekolah di tahun 2021 sebesar 11,72 yang artinya

bahwa rata-rata penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dapat menyelesaikan pendidikan selama 11,72 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat.

Faktor pendukung naiknya angka rata-rata lama sekolah antara lain tenaga pendidik adaptif terhadap perubahan metode pembelajaran, penyediaan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan, penyediaan wifi gratis, tingginya swadaya masyarakat (Relawan Mengajar) serta tingginya partisipasi orangtua dalam pendampingan proses pembelajaran.

Program pemerintah dalam hal pendidikan memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas penduduk yang berpendidikan. Dukungan berupa fasilitas pendidikan, sumber daya manusia, serta biaya yang sangat membantu meringkankan beban masyarakat kurang mampu.

#### **D. KOMPONEN PENGELUARAN (DAYA BELI)**

Komponen pengeluaran penyusun IPM dilihat dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pengeluaran masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh kondisi wilayah. Di Kota Yogyakarta, akses ke tempat perbelanjaan baik itu modern maupun tradisional



sangatlah mudah dan tersedia cukup banyak sehingga mendorong masyarakat untuk berbelanja. Selain itu kemudahan untuk berbelanja melalui platform *marketplace* semakin dimudahkan dengan adanya ekspedisi yang membuat masyarakat tidak perlu repot mengunjungi tempat perbelanjaan dan menghemat waktu. Pendapatan penduduk juga mempengaruhi pengeluaran, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula pengeluaran baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun memenuhi gaya hidup.

**Gambar 4. 5 Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 (Ribu rupiah)**



Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Pada tahun 2017 hingga 2021, pengeluaran tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 19,12 juta rupiah. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 pada saat dimulainya pandemi Covid-19 dengan capaian sebesar 18,67 juta rupiah. Pada tahun 2021 kembali meningkat dengan capaian 18,8 juta rupiah.



---

# KESIMPULAN

---



# KESIMPULAN



Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil pembahasan sebagai berikut :

- Capaian IPM Kota Yogyakarta hingga tahun 2021 terus meningkat dengan capaian sebesar 87,18 dengan kategori sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2021 semakin meningkat.
- Selaras dengan peningkatan capaian IPM pada tahun 2021, seluruh indikator penyusun IPM mengalami peningkatan pula dari tahun sebelumnya. Indeks kesehatan yaitu indikator Usia Harapan Hidup (UHH) setelah lahir sebesar 74,76 tahun. Indeks pendidikan yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada anak usia 7 tahun sebesar 17,6 tahun dan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 11,72 tahun. Serta indeks pengeluaran yaitu indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan pada capaian 18,8 juta meningkat 123.000 rupiah.



---

# DAFTAR PUSTAKA

---



# DAFTAR PUSTAKA




- BPS Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2019. Yogyakarta
- BPS Kota Yogyakarta. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. Yogyakarta
- BPS Kota Yogyakarta. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran 2016-2020. Yogyakarta
- BPS Kota Yogyakarta. 2018. Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018. Yogyakarta
- BPS Kota Yogyakarta. 2019. Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019. Yogyakarta
- BPS Kota Yogyakarta. 2020. Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020. Yogyakarta
- BPS Kota Yogyakarta. 2021. Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021. Yogyakarta
- BPS Kota Yogyakarta. 2022. Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022. Yogyakarta
- Mahi, Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarso. 2017. Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 2019. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2018. Yogyakarta.
- Todaro, Michael p. Stephen c. Smith. 2006. Pembangunan ekonomi jilid 1 edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNDP.1990. Human Development Report.UNDP.New York.
- Yektiningsih, Endang. 2018. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018.




**ANALISIS IPM**  
**( INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA )**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2021**




**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165

 [kominfo.jogjakota.go.id](http://kominfo.jogjakota.go.id)

 (0274) 551230, 561270

 08122780001

 [kominfosandi@jogjakota.go.id](mailto:kominfosandi@jogjakota.go.id)

 [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)